

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
SEMARANG TENTANG**

PEDOMAN PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dengan tepat waktu.

Rancangan ini disusun dalam rangka memberikan pedoman dalam penanganan konflik kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang agar dalam pelaksanaannya tepat guna, tepat sasaran, efektif, efisien dan akuntabel.

Demikian Rancangan Peraturan Bupati ini kami susun. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Rancangan Peraturan Bupati ini.

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>4</b>
A. LATAR BELAKANG.....	4
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	4
C. TUJUAN PENYUSUNAN .....	4
D. DASAR HUKUM .....	5
<b>BAB II POKOK PIKIRAN.....</b>	<b>7</b>
<b>BAB III MATERI MUATAN.....</b>	<b>8</b>
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN .....	8
B. RUANG LINGKUP MATERI.....	8
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>9</b>
A. SIMPULAN.....	9
B. SARAN .....	9
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Inspektorat Daerah bertugas melakukan pengawasan internal terhadap seluruh kegiatan instansi, termasuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran etika, yang mencakup konflik kepentingan. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mencegah penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pemerintah Daerah dalam mengambil keputusan, salah satunya dengan melakukan pengelolaan konflik kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang. Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan dapat mengandung informasi tentang konflik kepentingan dan pengelolaan konflik kepentingan perangkat daerah.

Agar pengelolaan konflik kepentingan dapat berjalan secara efektif maka perlu melaksanakan penyusunan kebijakan pedoman pengelolaan konflik kepentingan yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan peraturan perundang -undangan.

### **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Peraturan Bupati Semarang yang mengatur Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan peraturan perundang - undangan saat ini. Sehingga perlu adanya Peraturan Bupati yang mengatur Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **C. TUJUAN PENYUSUNAN**

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan konflik kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

#### **D. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652)
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 815);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 86 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Semarang. (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 86)

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang telah menyusun Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 32 Tahun 2019. Namun peraturan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan. Berdasarkan hal tersebut, perlu disusun Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan peraturan perundang - undangan.

## **BAB III**

### **MATERI MUATAN**

#### **A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Dengan tersusunnya Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang diharapkan pengendalian gratifikasi dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **B. RUANG LINGKUP MATERI**

Adapun lingkup yang diatur dalam rancangan Peraturan Bupati Semarang ini meliputi :

1. Ketentuan umum;
2. Konflik kepentingan;
3. Pengelolaan Konflik Kepentingan;
4. Ketentuan Penutup;

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang sebagai dasar dan pedoman dalam pengendalian gratifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

#### **B. SARAN**

Perlu disusun suatu Peraturan Bupati yang mengatur Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan peraturan perundang - undangan saat ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 815);
2. Peraturan Bupati Semarang Nomor 122 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor Bupati Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang.